

Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Bidang Kebudayaan

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Email: dadang@bappenas.go.id

ABSTRAK

Keywords: jatidiri bangsa, nasionalisme, warisan budaya, nilai budaya, budaya global.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk di antaranya pembangunan kebudayaan. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan.

Mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dilakukan ke dalam tiga tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Sementara perencanaan jangka pendek dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun. Sedangkan perencanaan jangka menengah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I Tahun 2005 – 2009. Mengingat pelaksanaan RPJMN I tahun 2005 – 2010 sudah memasuki tahun ke lima, maka perlu disusun RPJMN II tahun 2010 – 2014.

Tujuan umum dilaksanakannya kajian ini adalah untuk menyusun konsep kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan di bidang Kebudayaan, sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua (RPJMN II) periode tahun 2010-2014. Adapun tujuan khusus dari kajian ini, di antaranya adalah: (1) Melakukan identifikasi potensi, peluang, tantangan dan isu strategis dalam pembangunan di bidang kebudayaan; (2) Melakukan *review* dan analisa terhadap kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pertama periode 2005-2009 termasuk analisa peraturan perundang-undangan dan peraturan di Pusat dan daerah; (3) Melakukan perumusan sasaran, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan di bidang kebudayaan.

Kajian ini menemukan bahwa pada dasarnya pembangunan kebudayaan tahun 2005 – 2009 telah berada pada arah yang benar dengan berbagai kemajuan, meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan dan sasaran yang belum tercapai. Sementara berdasarkan hasil analisa situasi, ditemukan adanya beberapa peluang dan kekuatan di bidang kebudayaan. Peluang pembangunan lebih banyak berasal dari eksternal seperti pengaruh positif globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sementara kekuatan pembangunan kebudayaan lebih banyak berasal dari faktor internal seperti menguatnya *good government* dan *good governance* dalam sistem birokrasi Indonesia, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, dan kekayaan sumber daya budaya Indonesia yang unik dan beraneka ragam.

Selain itu, hasil analisa situasi juga masih menemukan adanya tantangan dan kelemahan di bidang kebudayaan. Tantangan pembangunan kebudayaan berasal dari faktor eksternal seperti pengaruh negatif budaya global yang mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sementara kelemahan pembangunan kebudayaan berasal dari faktor internal seperti pengaruh negatif kebijakan otonomi daerah, masih maraknya praktik korupsi, dan rendahnya SDM kebudayaan.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi berupa identifikasi isu strategis, arah kebijakan, dan program kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN I tahun 2005 – 2009, analisa situasi terhadap peluang, tantangan, hambatan dan kekuatan, serta proyeksi capaian sasaran pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga tahun 2010 – 2014.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Berdasarkan hasil survey bahasa daerah yang dilakukan Asosiasi Tradisi Lisan, 1999, bangsa Indonesia terdiri atas 550 suku bangsa dan 750 bahasa. Setiap suku bangsa memiliki identitas budaya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain.

Sebagai suatu negara-bangsa, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Suatu masyarakat yang merasa mempunyai kebudayaan, bahasa, karakter suku bangsa, dan sejarah yang relatif sama, dan kelompok-kelompok suku bangsa yang bersepakat tersebut, berada dalam satu kesatuan administrasi kolonial yang sama, yaitu Hindia Belanda. Sesuatu yang kemudian menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia ketika itu adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, suku bangsa dan budaya¹. Mereka disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan untuk melawan penjajah. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) berada dalam diri suku bangsa-suku bangsa tersebut. Semangat kebangsaan inilah yang kemudian mempersatukan mereka sebagai sebuah bangsa yang disebut negara Indonesia.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan akan sangat tergantung pada kebijakan yang menjadi landasan bagi perencanaan program-program tersebut. Untuk itu perencanaan pembangunan kebudayaan harus disusun dengan baik, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan bidang-bidang yang lain. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 saat ini telah memasuki tahun kelima. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan perlu disiapkan penyusunan RPJMN II tahun 2010-2014 secara utuh dan terintegrasi melalui proses perencanaan teknokratis yang bersifat partisipatif dengan tetap mengacu pada proses politik yang demokratis. Untuk itu diperlukan *background study* penyusunan RPJMN II tahun 2010-2014 Bidang Kebudayaan.

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan umum

Kajian ini bertujuan untuk menyusun konsep kebijakan, prioritas program dan kegiatan pokok pembangunan di bidang Kebudayaan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua (RPJMN II) periode tahun 2010-2014.

¹ Usman Pelly, "Masalah Batas-Batas Bangsa", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998*.

Tujuan Khusus

- Melakukan identifikasi potensi, peluang, tantangan, dan isu strategis pembangunan di bidang Kebudayaan.
- Melakukan analisa kecenderungan perkembangan pembangunan di bidang Kebudayaan 5 tahun ke depan.
- Melakukan review dan analisa terhadap kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009.
- Melakukan *benchmarking* strategy dan kebijakan pengembangan kebudayaan dengan berbagai negara.
- Melakukan perumusan sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang Kebudayaan.
- Melakukan perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang Kebudayaan.

1.3. Sasaran Kajian

Sasaran Kajian ini adalah terumuskannya kebijakan, sasaran dan program yang tepat dan layak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua (2010-2014) di bidang kebudayaan.

1.4. Manfaat Kajian

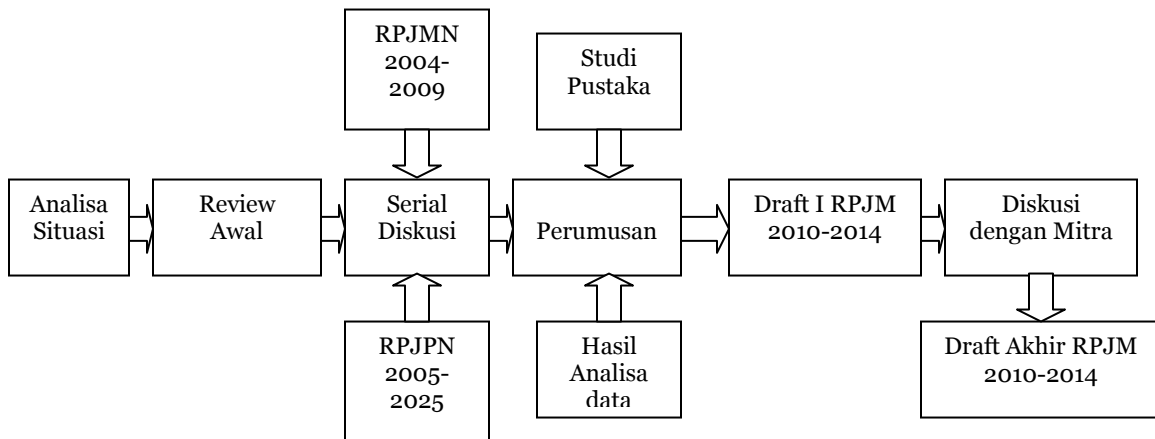
Kajian ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan, sasaran dan program yang tepat dan layak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua (2010-2014) di bidang kebudayaan.

1.5. Ruang Lingkup

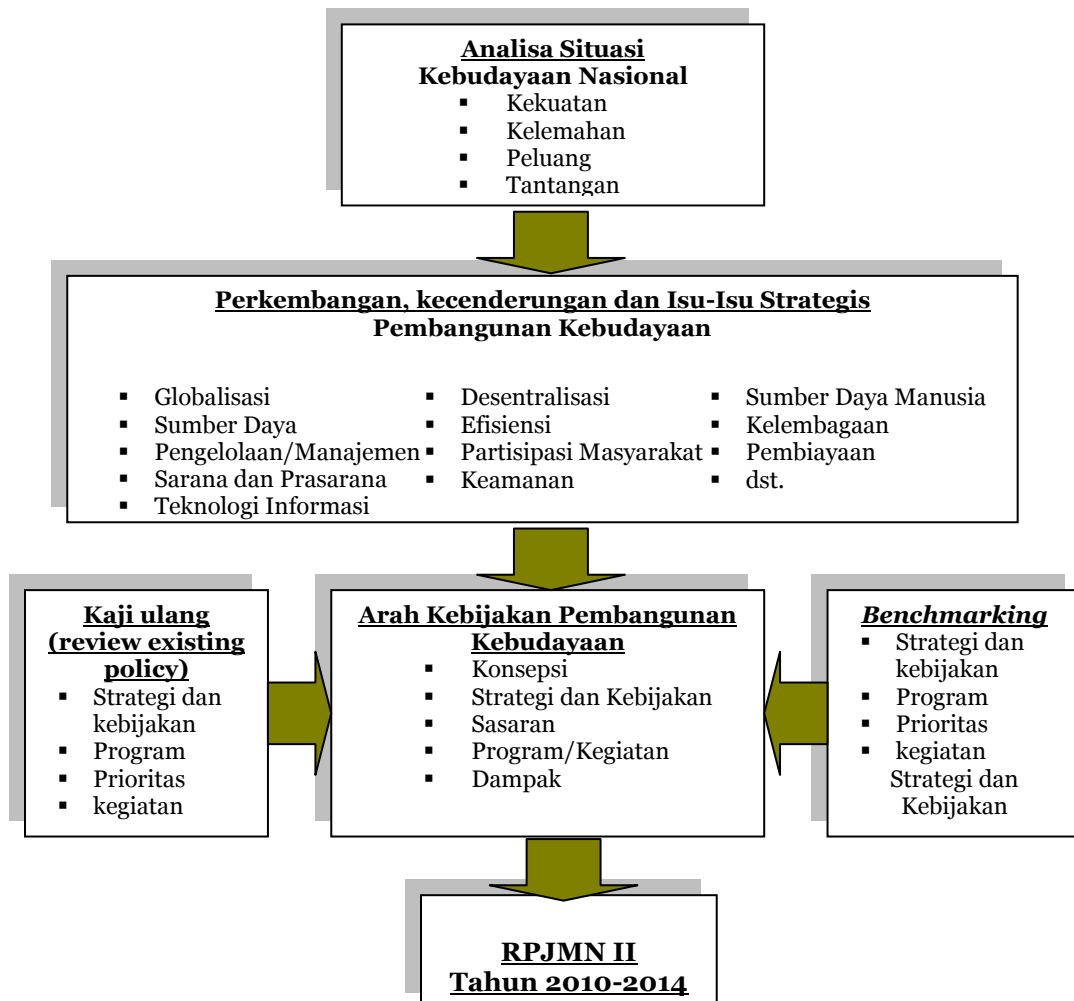
- Penjabaran visi, misi, arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025.
- Analisa kebijakan dan pelaksanaan RPJMN I tahun 2005 – 2009 bidang kebudayaan.
- Analisa situasi: peluang, tantangan, hambatan, kekuatan
- Menyusun rumusan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk menyusun RPJMN II tahun 2010 – 2014.

1.6. Metode Kajian

Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kajian



Gambar 2. Alur Pikir *Background Study*



II. REVIEW KEBIJAKAN RPJMN I TAHUN 2005 – 2009

2.1. Pencapaian Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur pada tahun 2004-2009 adalah :

- Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;
- Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kebudayaan seperti yang ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009, dilaksanakan melalui 3 program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; (2) Program Pengembangan Nilai Budaya; dan (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

2.2. Permasalahan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2005 - 2009

2.2.1. Masih lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.² Fenomena itu mengkhawatirkan karena Indonesia terdiri dari sejumlah suku bangsa. Masalah ini juga semakin serius akibat dari semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola bersama oleh masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Fenomena keterbatasan ruang publik ini muncul karena ada kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat akibat desakan ekonomi. Selain itu dengan dampak otonomi daerah telah juga membuat identitas kedaerahan dan kesukuan menguat sehingga mengancam identitas nasional.

2.2.2. Terjadinya krisis jati diri (identitas) nasional.

Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Demikian pula kebanggaan atas jati diri bangsa seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, semakin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih unggul. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, serta tidak mampunya bangsa Indonesia mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi

² Sebagai ilustrasi kondisi konflik paska reformasi, berdasarkan data yang dilansir oleh UNSFIR (Badan PBB untuk Transisi Indonesia), konflik komunal yang mengakibatkan kekerasan di Indonesia (1990 – 2001) terdapat 1.093 kasus dengan jumlah korban meninggal 6.208 jiwa. Dengan mayoritas kasus konflik adalah konflik kekerasan komunal atau konflik antar warga, baik yang bersifat konflik etnik, agama, kekerasan massa, dan *political interest*. Sumber: Zulfan Tadjoeeddin, *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Konteks Transisi (1990 – 2001)*, UNSFIR, 2002.

upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*). Laju pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.

2.2.3. Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (*tangible*) dan yang tidak kasat mata (*intangible*).

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun sampai dengan saat ini, kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam pelaksanaannya masih sangat beragam. Beragamnya kualitas pengelolaan tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan informasi.

2.3. Tindak Lanjut

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMN 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan: (1) menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, (2) menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan terhadap martabat bangsa, (3) menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun non-fisik (*cultural based development*), dan (4) mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya dan warisan budaya serta warisan alam.

III. BENCHMARKING PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan sebagai studi banding dalam pembangunan kebudayaan nasional, di antaranya India, Belanda, Afrika Selatan, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Turki, dan China. Setelah memperhatikan pembangunan kebudayaan dari beberapa negara tersebut, kajian ini berhasil menemukan berbagai macam pendekatan dalam pembangunan kebudayaan. Pada dasarnya setiap negara menginginkan pembangunan kebudayaan yang sesuai dengan karakter bangsanya dan sesuai dengan akar kebudayaan (lokalitas) yang dimiliki. Beberapa negara memberikan peluang bagi warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebudayaan. Selain itu, banyak negara menjadikan kesenian dan kebudayaan sebagai komoditi yang bernilai ekonomis tinggi dan mengemasnya menjadi paket wisata.

Selain itu, kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas seni modern dengan tetap melestarikan kebudayaan tradisional sudah ada menjadi salah satu fokus pembangunan kebudayaan di berbagai negara. Sebagaimana contoh, negara-negara di Eropa seperti Inggris dan Perancis memberikan insentif selama masa tertentu untuk

melindungi dan menumbuhkan film-film yang ‘serius’ tapi berbobot yang belum mempunyai pasar namun diputar melalui bioskop dengan memberikan subsidi. Film-film tersebut berfungsi sebagai mediator transformasi dan diseminasi nilai-nilai budaya yang ingin dimunculkan. Berbagai negara meningkatkan kreativitasnya dengan mencari celah yang dapat dijadikan sebagai terobosan strategis untuk membumikan kebudayaan yang mereka miliki seperti India, Korea Selatan, dan China melalui perfilman.

Langkah serupa dilakukan pula di Amerika. Ketika terjadi pertentangan ras kulit hitam karena konsekuensi keragaman ras dan budaya yang dimiliki, maka film TV keluarga *The Huxtable* (Bill Cosby dkk.) yang disajikan dalam drama jenaka dan menggambarkan situasi keluarga kulit hitam yang mampu berinteraksi dengan berbagai ras lain, ditayangkan di televisi dalam rentang 10 tahun. Film tersebut mampu memberikan sumbangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan keberagaman antar ras melalui budaya. Demikian pula di India, film anak-anak yang ada mampu memberikan perlindungan (proteksi) dan menciptakan segmen pasar yang kokoh. Beberapa film anak-anak produksi dalam negeri mampu bersaing dengan berbagai film produk luar negeri. Sementara itu, di Thailand dan Cina melakukan proteksi dengan cara membeli hak untuk menggandakan film-film laris dari berbagai belahan dunia yang disesuaikan dengan kepentingan negaranya.

Beberapa temuan menarik terhadap kebijakan yang dikembangkan dalam konteks pembangunan kebudayaan di berbagai negara antara lain, sebagai berikut.

- a. Strategi pencitraan (*image*) dengan menciptakan ikon-ikon seni, tradisi dan budaya dalam berbagai bentuk atau kemasan yang menjadi ciri khas budaya suatu negara sehingga mampu meningkatkan minat dan perhatian masyarakat dunia.
- b. Penguatan kelembagaan pengelolaan kebudayaan di daerah, baik dari aspek sumberdaya manusia, manajemen pengelolaan, pembiayaan, maupun program dan kegiatan.
- c. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi pembangunan kebudayaan.
- d. Peningkatan strategi promosi kebudayaan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kebudayaan kepada masyarakat dunia secara luas.
- e. Pemanfaatan media kreasi seni perfilman untuk melestarikan dan mengembangkan nilai, kearifan lokal atau tradisi yang terkandung dari keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu negara.
- f. Penanaman nilai, jatidiri dan karakter bangsa yang mengakar dengan menumbuhkan rasa persatuan, cinta tanah air dan kearifan lokal sejak dini melalui pendidikan di sekolah.
- g. Pemberian dukungan terhadap pengembangan pusat kegiatan kebudayaan (museum, galeri dan taman budaya), kesenian, dan perpustakaan sebagai bagian dari wahana pembangunan seni dan budaya bangsa.

- h. Keberpihakan pemerintah dalam melindungi dan memelihara seni, budaya dan nilai kearifan lokal melalui kebijakan pembangunan dan peraturan-perundangan yang dapat menyeimbangkan modernisasi dengan nilai kearifan lokal.

IV. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010 – 2014

4.1. Isu Strategis

4.1.1. Jati Diri dan Karakter Bangsa

Terjadinya gejala krisis identitas sebagai akibat semakin menurunnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru, mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, yang disertai dengan tumbuhnya semangat kebebasan, menimbulkan tumbuhnya pandangan yang serba boleh (*permisif*) sehingga mengakibatkan menguatnya berbagai macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat.

Sementara itu, juga terjadi kecenderungan menguatnya sikap sentimen antar ras, agama, dan sukubangsa yang ditandai dengan menggejalanya konflik dan friksi-friksi antar kelompok. Kondisi tersebut tidak terlepas dari semakin menguatnya identitas-identitas kelokalan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Penguatan identitas kelokalan tersebut membentuk lingkungan eksklusivisme dalam identitas yang sifatnya partial. Identitas kelokalan ini biasa disebut sebagai identitas sosial kolektif³ dan mencakup homogenitas (kesamaan) dari aktor-aktor yang disatukan didalamnya.

Identitas sosial kolektif akan menjadi semakin kuat dan tidak terkendali dalam wacana politik demokrasi apabila pemerintah dalam posisi yang lemah. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan infrastruktur demokrasi, dimana batas-batas sosial identitas kolektif dapat ditentukan dan dijaga keseimbangannya. Dalam konteks demokrasi, pemerintah mempunyai peran untuk mengatur dan mengelola identitas sosial kolektif tersebut dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, apabila posisi pemerintah secara politik dianggap lemah dan merosot kewibawaannya, maka posisi identitas sosial kolektif akan semakin menguat yang pada akhirnya akan memudahkan identitas nasional.

Memudarnya rasa nasionalisme juga dirasakan dan merupakan tantangan berat dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan alat untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan identitas nasional. Ikatan nasionalisme tumbuh pada saat masyarakat mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, sehingga naluri untuk mempertahankan wilayah sebagai tempat untuk menggantungkan hidup mulai dilakukan. Secara historis, kelahiran bangsa dan negara Indonesia dengan ikatan nasionalisme dilalui melalui proses yang panjang dan sangat dinamis. Nasionalisme bangsa Indonesia tumbuh dan terbentuk seiring dengan perkembangan masyarakat dari tahap tradisional ke masyarakat kolonial, dan selanjutnya menuju kepada masyarakat pascakolonial. Dalam proses perkembangannya, nasionalisme

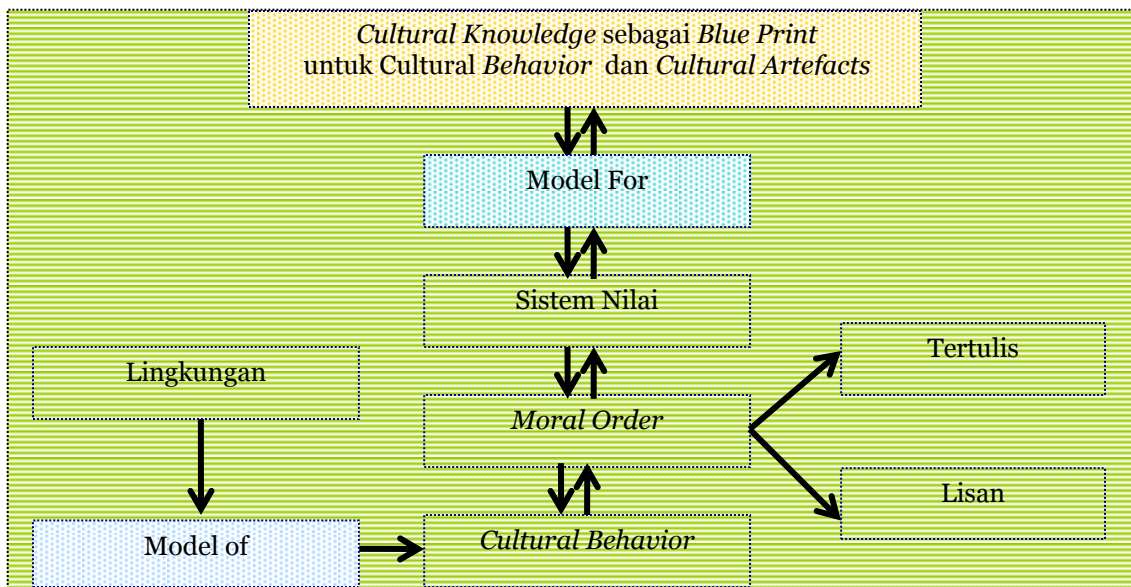
³ Stuart Hall, *Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for The Representation of Identity* edited by Anthony D. King. Houdmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan Education Ltd, 1991.

diwarnai oleh berbagai distorsi dan perubahan secara dinamis, baik berupa ketegangan, konflik, penyesuaian, integrasi, maupun disintegrasi.

4.1.2. Adaptasi, Transformasi, dan Interaksi Antara Nilai-Nilai Lokal-Tradisional Dengan Nilai-Nilai Universal (Modern)

Terjadinya perubahan orientasi nilai budaya ke arah nilai-nilai pasar yang menimbulkan efek negatif dalam perilaku sosial di tengah masyarakat. Kekuatan pasar dan kapitalisme yang menjadi inti dari globalisasi ikut mengubah orientasi nilai budaya bangsa Indonesia sehingga memunculkan identitas dan perilaku baru yang tidak sesuai dengan nilai, tradisi dan budaya lokal-tradisional. Proses interaksi yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi-pasar telah memunculkan terciptanya kondisi pemaksaan kultur “baru” yang dibentuk oleh pasar dan kapitalisme global ke dalam sendi-sendi nilai, tradisi dan budaya seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.

Gambar 3. Model Perilaku Manusia Modern



Sebagaimana dikemukakan oleh Sjafrli Sairin⁴, timbulnya perilaku negatif di tengah masyarakat sebagai akibat serbuan globalisasi. Perilaku negatif tersebut seperti semakin kurang tolerannya terhadap perbedaan, maraknya KKN, *tegel* dan *mentolo* (*heartless*), meningkatnya regionalisme (*ethnic state*), otoritarianisme masyarakat, menipisnya *mutual trust*, menurunnya kredibilitas para pemimpin, dan luar negeri *minded*. Perubahan dan pergeseran tatanan hidup yang disebabkan oleh munculnya perilaku-perilaku “baru” yang tidak memiliki referensi nilai-tradisi dalam budaya tradisional masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berubahnya referensi budaya masyarakat dari *model for* (sesuatu yang dipelajari dari nilai-nilai normatif tradisional)

⁴ Disampaikan dalam Diskusi “Ketahanan Budaya” dalam rangka Backgroud Study Penyusunan RPJMN 20010-2014 Bidang SDM dan Kebudayaan di Bappenas 3 Juli 2008.

kepada *model of* (sesuatu yang berkembang di masyarakat). Sementara *model of* yang muncul saat ini, banyak dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Secara umum perkembangan itu dapat digambarkan sebagai berikut.

Krisis Moral dan etika merupakan isu penting yang mengakibatkan munculnya mental *nrabas*, mental feodal, *shameless culture* (tidak punya malu), hedonisme dan materialisme, pamer (*display*), kurang percaya diri, dan merebaknya budaya *instant*. Sjafrin Sairin juga melihat efek negatif yang sama ketika nilai-nilai budaya tradisional yang melekat di tengah masyarakat semakin pudar.

Lemahnya kesadaran budaya berefek pula pada hilangnya kearifan lokal dalam hubungan dengan lingkungan. Uang dan eksploitasi kapitalisme telah memaksa masyarakat untuk “tega” menghabiskan sumber daya alam (hutan dan sumber air) yang secara budaya banyak “dijaga” dengan nilai-nilai tradisional seperti yang kita kenal selama ini dengan istilah “tabu”. Ketakutan untuk melanggar tabu yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat selama menjadi pengikat masyarakat untuk tetap mempertahankan keasrian dan kelestarian sumber daya alam. Namun, ketika ada dorongan kuat untuk mendapatkan berbagai barang-barang konsumsi modern dengan harus menyediakan uang dalam jumlah banyak, “tabu-tabu” itu semakin hari kian mudah dilanggar. Tambahan lagi, ketika para pengusaha berkapital besar yang berorientasi terhadap keuntungan secara ekonomis dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam semakin membuat nilai-nilai “tabu” di tengah masyarakat hanya tinggal cerita. Masyarakat “dipaksa” untuk semakin tidak percaya pada tabu dan ikut mengeksplorasi berbagai sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi semata.

Sedangkan sikap toleransi antar masyarakat juga semakin luntur, yang ditandai oleh terjadinya kecemburuan sosial, prasangka sosial, dan bahkan kerusuhan atau tawuran antarwarga yang berbeda agama, atau antarsuku. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, potensi konflik jelas memungkinkan dan mudah terjadi apabila diprovokasi. Oleh karena itu toleransi sebagai peredam emosi keagamaan menjadi penting bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia.

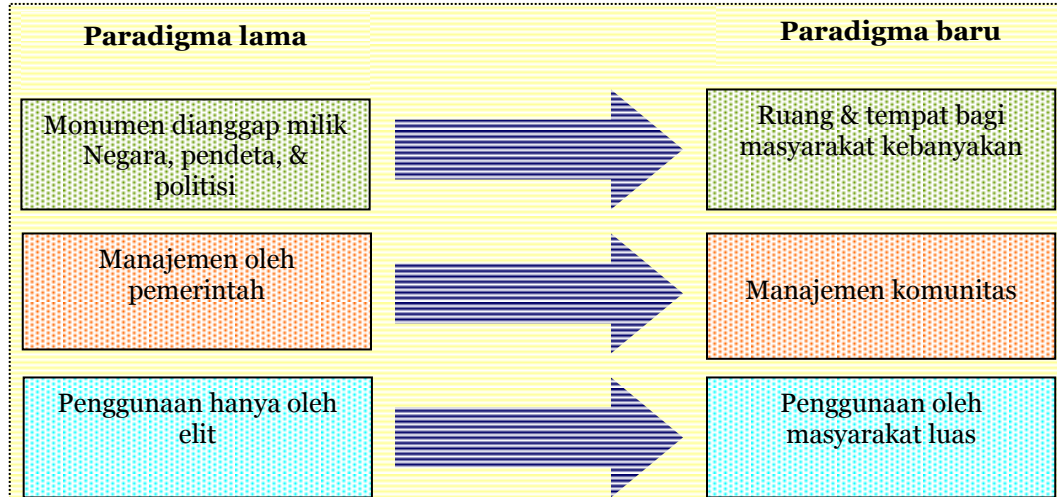
4.1.3. Kemampuan Bangsa Dalam Mengelola Kekayaan Budaya

Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, baik yang kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*). Kekayaan budaya merupakan identitas peradaban sebuah bangsa. Hal ini sebabkan oleh rendahnya komitmen pemerintah terhadap pengelolaan kekayaan budaya, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, dan kesadaran arti pentingnya benda cagar budaya sebagai sarana edukasi, rekreasi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya juga masih rendah. Pada akhir dekade ini, terdapat perkembangan dalam pengelolaan sumber daya di mana terjadi perubahan paradigma dalam memandang warisan budaya dan pengelolaannya. Perubahan paradigma tersebut antara lain adalah pergeseran konsep pengelolaan dari yang sebelumnya bersifat “*landmark*” atau fokus kegiatan yang bersifat monumen semata ke arah pengelolaan yang mengacu kepada pengelolaan yang bersifat *cultural landscape* atau kawasan budaya yang mengintegrasikan sistem pengelolaan

antara yang *tangible* dan yang *intangible*. Dalam konteks ini konsep pengelolaan kekayaan budaya harus dapat menunjukkan manfaat bagi masyarakat.⁵

Gambar 4. Perubahan Paradigma Pengelolaan Warisan Budaya Menurut UNESCO



Sumber : Richard A. Engelhardt, UNESCO, 2007.

Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan pemilik atau pengelola satu-satunya dari warisan budaya tersebut, namun merupakan salah satu *stakeholder*. Hal tersebut terkait dengan tujuan dari pelestarian kekayaan budaya (pusaka) yaitu memelihara sumber daya dan identitas suatu kawasan pusaka, serta mengembangkan aspek tertentu guna memenuhi kebutuhan masa depan tanpa merusak lingkungan pusaka. Masyarakat setempat juga memiliki peran yang penting dalam aksi pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan. Pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya⁶.

⁵ Richard A. Engelhardt, Values-Based Management, makalah dalam Management & Conservation of World Heritage Sites, UNESCO, Hiroshima, Jepang, 15-20 April 2007.

⁶ Laretna Adhisakti, Pengembangan KBM: Belajar dari pengalaman Negara lain, makalah dalam diskusi kebudayaan 2005.

Gambar 5. Stakeholder Dalam Konsep Pengelolaan Warisan budaya



Sumber: adaptasi dari Richard A. Engelhardt, UNESCO, 2007

4.1.4. Pengelolaan Sumber Daya Budaya

Keterbatasan SDM di bidang kebudayaan ini disebabkan oleh tidak adanya proses regenerasi secara berkelanjutan. Minat generasi muda untuk menjadi tenaga kebudayaan seperti filolog semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari semakin sedikitnya peminat jurusan ilmu-ilmu budaya dibandingkan dengan jurusan ilmu-ilmu eksakta. Sedikitnya minat generasi muda untuk mempelajari ilmu-ilmu budaya dikarenakan ada anggapan bahwa ilmu eksakta seperti kedokteran dan teknik lebih menjanjikan bagi masa depan mereka dibandingkan dengan ilmu-ilmu budaya seperti ilmu bahasa daerah, arkeologi, antropologi, dan museologi.

Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai amanat UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap perubahan paradigma dalam pembangunan kebudayaan. Paradigma baru mengakui keragaman nilai, tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan dan potensi masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, penerapan sistem otonomi daerah juga memberikan peluang terjadinya “penguasaan” etnis-suku dominan untuk menguasai (mayoritas) wilayah administratif yang dapat menciptakan marginalisasi peran

etnis-suku lain (minoritas) di wilayah tersebut. Fenomena pemekaran wilayah administrasi yang didasari pada kelompok kesukubangsaan menjadi gambaran umum ketika identitas etnis-suku mendapatkan tempat dalam suatu wilayah. Isu “putra daerah” dalam kebijakan pemilihan dan penempatan di posisi-posisi strategis baik di bidang pemerintahan maupun di lembaga di luar pemerintahan telah menjadi warna lain dari bias pelaksanaan otonomi daerah.

4.2. Sasaran

- a. Terwujudnya pembentukan jati diri dan karakter bangsa melalui peningkatan kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan serta penyebarluasan pola pengembangan modal budaya (*cultural resources*) dan modal sosial (*social capital*) yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan untuk meningkatkan martabat manusia dan memperkuat ketahanan budaya.
- b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya dan interaksi antar budaya, pentingnya toleransi, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
- c. Terkelolalanya kekayaan budaya bangsa yang didukung oleh kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
- d. Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelola pembangunan kebudayaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik (*good governance*), koordinasi antar tingkat pemerintahan serta partisipasi masyarakat.

4.3. Arah Kebijakan

- a. Membangun dan memantapkan jati diri dan karakter bangsa (identitas nasional) yang berbasis pada pluralisme/multikultur.
- b. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya, dan melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman.
- c. Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelolaan pembangunan kebudayaan dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang disertai oleh peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

4.4. Program

- a. Program Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJMN I tahun 2005–2009, diketahui bahwa pembangunan bidang kebudayaan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat jati diri bangsa dalam kerangka multikultur, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai.

Sementara berdasarkan hasil analisa situasi, ditemukan adanya beberapa peluang dan kekuatan di bidang kebudayaan. Peluang pembangunan kebudayaan lebih banyak berasal dari eksternal seperti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membuka peluang pertukaran budaya antar bangsa, dan merebaknya demokratisasi di berbagai negara sehingga memberikan kebebasan dalam melakukan ekspresi seni dan budaya. Sedangkan kekuatan pembangunan kebudayaan yang berasal dari faktor internal adalah menguatnya *good goverment* dan *good governance* dalam sistem birokrasi Indonesia, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, dan kekayaan sumber daya budaya Indonesia yang unik dan beraneka ragam.

Selain itu, hasil analisa situasi juga menemukan adanya tantangan dan kelemahan dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Tantangan pembangunan kebudayaan yang berasal dari faktor eksternal antara lain pengaruh negatif budaya global yang mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sementara kelemahan pembangunan kebudayaan berasal dari faktor internal seperti pengaruh negatif kebijakan otonomi daerah, masih maraknya praktik korupsi, dan rendahnya SDM kebudayaan.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi berupa identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN I tahun 2005 – 2009, analisa situasi terhadap peluang, tantangan, hambatan dan kekuatan, serta proyeksi capaian sasaran pembangunan kebudayaan tahun 2010 – 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zuhail, Kekuatan Daya Saing Indonesia; Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan. Jakarta: Kompas, 2008.
- Ginandjar Kartasasmita. 1997. Pembangunan Nasional Dalam Repelita VII.
- Harison, Lawrence dan Samuel Huntington (ed.)(2006). *“Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan Manusia”*. Jakarta: LP3S
- Kiram, Yanuar. (2008). *Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Dalam mendukung pembangunan Pemuda dan Olahraga*. Makalah Diskusi. Jakarta: Bappenas-Kemenegpora
- Mudji Sutrisno (2008). *“Filsafat Kebudayaan, Ikhtiar sebuah teks. Kebangkitan”*. Jakarta: Hujan Kabisat.
- Nugroho, Garin. (2008). *Memperkuat Media dalam Pembangunan ketahanan kebudayaan nasional*. Makalah Diskusi. Jakarta: Bappenas-Depbudpar
- Sairin, Syafril. (2008). *Kebudayaan dan Dinamika*. Makalah Diskusi. Jakarta: Bappenas-Depbudpar.
- Stiglitz. Joseph E. (2007). *“Making Globalization Work. Newyork: WW Norton&Co*
- Sjafril Sairin, Makalah disampaikan dalam Diskusi Ketahanan Budaya dalam rangka Backgroud Study Penyusunan RPJMN 2010-2014 Bidang SDM dan Kebudayaan di Bappenas, 3 Juli 2008.
- *UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Jakarta, 2007.
- *PP RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 – 2009*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Jakarta, 2005.